



# RENCANA KERJA 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**TAHUN ANGGARAN 2023**



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 92 TAHUN 2023

TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
21. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor );
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262); Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
38. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);
39. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun;
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yaitu :

- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
- b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah, yang berpedoman pada RPD dan RKPD;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan;

### BAB III

#### SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### BAB V PENUTUP

- (2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada masing-masing Renja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

#### Pasal 5

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Rumah Sakit Bayu Asih;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
11. Dinas Pangan dan Pertanian;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

16. Dinas Perhubungan;
17. Dinas Komunikasi dan Informatika;
18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian;
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
22. Dinas Perikanan dan Peternakan;
23. Sekretariat Daerah;
24. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
25. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
27. Badan Pendapatan Daerah;
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
29. Inspektorat;
30. Kecamatan Jatiluhur;
31. Kecamatan Sukasari;
32. Kecamatan Maniis;
33. Kecamatan Tegalwaru;
34. Kecamatan Plered;
35. Kecamatan Sukatani;
36. Kecamatan Darangdan;
37. Kecamatan Bojong;
38. Kecamatan Wanayasa;
39. Kecamatan Kiarapedes;
40. Kecamatan Pasawahan;
41. Kecamatan Pondoksalam;
42. Kecamatan Purwakarta;
43. Kecamatan Babakan Cikao;

- 44. Kecamatan Campaka;
- 45. Kecamatan Cibatu;
- 46. Kecamatan Bungursari;
- 47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

#### Pasal 6

Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila terjadi Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 27 Juli 2023

BUPATI PURWAKARTA,  
  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 27 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

  
NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 92



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jln Veteran Komplek Griya Hegarmanah Ciseureuh Purwakarta (41118)  
Telepon (0264) 201019, Faksimili. (0264) 201019, email : [bkdpwk@gmail.com](mailto:bkdpwk@gmail.com)  
Website : [bkpsdm.purwakartakab.go.id](http://bkpsdm.purwakartakab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : KU.01.02 / Kep.107 - BKPSDM / 2023**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2024  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan rencana kerja (Renja) sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan pelaksanaan Musrembang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2006 nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2008 nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 55);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);
17. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 88);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN  
PURWAKARTA  
NOMOR : KU.01.02 / Kep. 107 - BKPSDM / 2023  
TANGGAL : 14 MARET 2023  
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA**

- I Penanggung Jawab : Kepala BKPSDM  
II Ketua : Sekretaris BKPSDM  
III Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengadaan  
Kepala Bidang Pengembangan Sumber  
Daya Manusia  
Kepala Bidang Pembinaan dan  
Kesejahteraan  
IV Sekretaris : Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan  
dan Pelaporan  
V Anggota : Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum  
Analisis Kepegawaian Ahli Muda (1 orang)  
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli  
Muda (6) Orang

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN PURWAKARTA



**H. WAHYU WIBISONO**

NIP. 19670829 199503 1 001

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena limpahan Rahmat dan Karunia-Nya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, serta isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan. Tujuan penyusunan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Purwakarta tahun 2024 ini adalah sebagai acuan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mengoperasionalkan RKPD 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mencapai visi dan misi jangka menengah daerah.

Mudah-mudahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini dapat bermanfaat untuk menjadi rujukan serta pedoman bagi jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas.

Purwakarta, Juli 2023



**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**H. WAHYU WIBISONO**  
NIP. 196708291995031001

**DAFTAR ISI**

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN LALU .....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra BKPSDM Kabupaten Purwakarta .....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Purwakarta .....	19
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Purwakarta .....	23
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM KABUPATEN PURWAKARTA .....	38
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM Kabupaten Purwakarta .....	39
3.3 Program dan Kegiatan .....	44
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM KABUPATEN PURWAKARTA .....	54
4.1 Rencana Kerja .....	54
4.2 Pendanaan .....	55
BAB V PENUTUP .....	56

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra BKPSDM s/d Tahun 2023 .....	11
2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Purwakarta .....	21
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Purwakarta .....	25
2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Purwakarta .....	37
3.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pada BKPSDM Kabupaten Purwakarta .....	41
3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Purwakarta .....	43

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan daerah sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib Menyusun Rencana Pembangunan Daerah baik yang bersifat jangka Panjang 20 tahunan (RPJPD) jangka menengah 5 tahunan (RPJMD) maupun yang bersifat pendek 1 tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 maka Organisasi Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun anggaran 2024.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah

diwajibkan Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang. Keterkaitan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dengan RKPD adalah Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta harus mendukung dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) oleh Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Selain itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah juga memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang berpedoman pada RKPD dan bersifat indikatif. Keterkaitan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Purwakarta harus

mendukung dalam mewujudkan visi pembangunan kabupaten Purwakarta Tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dari Keterkaitan perencanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024. Sedangkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah akan menjadi acuan dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi Dan Nomenkatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2006 nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2008 nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2012 nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 55);
21. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 51);
22. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta

Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);

23. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 88);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 yaitu sebagai pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026;
2. Sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Mewujudkan integritas, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan;

4. Sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang ditetapkan;

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Purwakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika seperti alur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini berisi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta terhadap rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, dan rumusan rencana program dan Kegiatan.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini mengemukakan rencana kerja program kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam table matrik.

## **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM KABUPATEN PURWAKARTA**  
**TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDM Kabupaten Purwakarta**

Dalam melakukan penyusunan Rencana kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 terhadap capaian Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu 2023.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2022 terhadap target di Tahun 2023.

Evaluasi terhadap capaian Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun ke-empat pelaksanaan Renstra BKPSDM Kabupaten Purwakarta 2018-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada table 2.1 berikut :

**Tabel. 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra**  
**BKPSDM Kabupaten Purwakarta s.d Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra BKPSDM Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja BKPSDM tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BKPSDM s/d Tahun berjalan 2023	
					Target Renja BKPSDM Tahun 2022	Realisasi Renja BKPSDM Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = (10/4)
4.05	<b>Kepegawaian</b>									
4.05.4.05.01	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>									
4.05.4.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00
4.05.4.05.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00
4.05.4.05.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00
4.05.4.05.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra BKPSDM Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja BKPSDM tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BKPSDM s/d Tahun berjalan 2023	
					Target Renja BKPSDM Tahun 2022	Realisasi Renja BKPSDM Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = (10/4)
4.05.4.05.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00
4.05.4.05.01.07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran									
		1. Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	200,00	200,00	-	-	-	-	200,00	100,00
		2. Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana/ Prasarana Kantor	200,00	200,00	-	-	-	-	200,00	100,00
		3. Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	200,00	200,00	-	-	-	-	200,00	100,00
		4. Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	200,00	200,00	-	-	-	-	200,00	100,00
		5. Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Perundang - Undangan	200,00	200,00	-	-	-	-	200,00	100,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra BKPSDM Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja BKPSDM tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BKPSDM s/d Tahun berjalan 2023	
					Target Renja BKPSDM Tahun 2022	Realisasi Renja BKPSDM Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = (10/4)
		6. Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	200,00	200,00	-	-	-	-	200,00	100,00
4.05.4.05.01.18	Program Peningkatan Kedisiplinan dan Kinerja Aparatur Pemerintah									
		1. Persentase penurunan Indisipliner pegawai	6,19	3,50	-	-	-	-	3,50	56,52
		2. Persentase Peraturan Perundang-undangan dibidang kepegawaian yang disosialisasikan	150,00	100,00	-	-	-	-	100,00	66,67
		3. Persentase Sistem Aplikasi Kinerja	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00
4.05.4.05.01.19	Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara									
		1. Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai	0,35	2,58	-	-	-	-	2,58	737,14
		2. Persentase pengisian pemangku Jabatan Tinggi Pratama, jabatan Administrator, dan jabatan pengawas	166,59	166,23	-	-	-	-	166,23	99,78

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra BKPSDM Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja BKPSDM tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BKPSDM s/d Tahun berjalan 2023	
					Target Renja BKPSDM Tahun 2022	Realisasi Renja BKPSDM Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = (10/4)
		3. Persentase Penataan ASN sesuai dengan kompetensi	103,62	13,26	-	-	-	-	13,26	12,79
		4. Persentase Pelayanan kenaikan pangkat pegawai yang tepat waktu	120,34	103,07	-	-	-	-	103,07	85,65
		5. Persentase data ASN yang mutakhir	200,00	194,07	-	-	-	-	194,07	97,04
		6. Persentase Integrasi Aplikasi Kepegawaian	100,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
4.05.4.05.01.20	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah									
		1. Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN	200,00	100,00	-	-	-	-	100,00	50,00
		2. Persentase ASN berprestasi/berinovasi/teladan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan	2,54	2,62	-	-	-	-	2,62	103,15
		3. Persentase ASN Purna bhakti/pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu	8,53	9,40	-	-	-	-	9,40	110,20

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra BKPSDM Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja BKPSDM tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BKPSDM s/d Tahun berjalan 2023	
					Target Renja BKPSDM Tahun 2022	Realisasi Renja BKPSDM Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = (10/4)
5.03.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota									
		1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	BB	A	100,00	A	A	100,00
		2. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	270,00	92,00	90,00	62,25	69,17	90,00	165,42	61,27
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah									
		1. Persentase Penurunan Indisipliner pegawai	9,99	0,43	3,33	5,88	189,49	3,33	6,31	63,16
		2. Persentase Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian Yang Disosialisasikan	300,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	66,67
		3. Persentase Sistem Aplikasi Kinerja	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	66,67
		4. Persentase ASN berprestasi/Berinovasi/ Teladan dan Berdedikasi Yang Mendapat Penghargaan	3,84	1,50	1,28	4,85	378,90	1,28	7,78	202,60

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra BKPSDM Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja BKPSDM tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BKPSDM s/d Tahun berjalan 2023	
					Target Renja BKPSDM Tahun 2022	Realisasi Renja BKPSDM Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = (10/4)
		5. Persentase ASN Purnabhakti/ Pensiun Yang Mendapat Penghargaan dan Tepat Waktu	12,69	6,01	4,23	4,65	109,92	4,23	11,76	92,67
		6. Persentase Pengadaan ASN Sesuai Kebutuhan Formasi Pegawai	1,05	5,58	0,35	0,27	77,14	0,35	5,85	557,14
		7. Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas	300,00	95,96	100,00	97,07	97,07	100,00	290,26	96,76
		8. Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi	300,00	72,00	100,00	91,93	91,93	100,00	163,93	54,64
		9. Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu	300,00	93,27	100,00	84,53	84,53	100,00	262,34	87,44
		10. Persentase Data ASN Yang Mutakhir	300,00	96,61	100,00	98,48	98,48	100,00	220,09	73,36
		11. Persentase Integrasi Aplikasi Kepegawaian	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	66,67

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra BKPSDM Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja BKPSDM tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BKPSDM s/d Tahun berjalan 2023	
					Target Renja BKPSDM Tahun 2022	Realisasi Renja BKPSDM Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= (5+7+9)	11 =(10/4)
5.04	Pendidikan dan Pelatihan									
4.05.4.05.01.17	Program peningkatan Potensi dan kompetensi SDM Aparatur Pemerintah									
		1. Persentase Calon ASN yang telah mengikuti Pelatihan Dasar	100,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
		2. Persentase ASN yang diklat fungsional/teknis/bimtek/seminar/ lokakarya dan Tugas Belajar	1,53	1,88	-	-	-	-	1,88	122,88
		3. Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	12,15	4,25	-	-	-	-	4,25	34,98
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia									
		1. Persentase Calon ASN Yang Telah Mengikuti Pelatihan Dasar	300,00	100,00	100,00	97,46	197,46	100,00	197,46	65,82

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra BKPSDM Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja BKPSDM tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BKPSDM s/d Tahun berjalan 2023	
					Target Renja BKPSDM Tahun 2022	Realisasi Renja BKPSDM Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = (10/4)
		2. Persentase ASN Yang Diklat Fungsional/Teknis/Bimtek/Seminar/ Lokakarya dan Tugas Belajar	4,59	0,33	1,53	0,99	64,70	1,53	1,32	28,76
		3. Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	36,45	4,98	12,15	12,15	100,00	12,15	17,13	47,00

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta pada Tahun Anggaran 2022 menerima alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta, dengan jumlah Anggaran Perubahan Sebesar Rp. 49.002.957.632,- terdiri dari :

a. Belanja Operasional

Anggaran dalam Belanja Operasional terdiri dari belanja pegawai, Belanja Barang dan Jasa dengan besaran anggaran Rp. 48.781.701.532,- terealisasi Rp. 30.894.929.265,- (63,33%)

b. Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 221.256.100,- terealisasi Rp. 220.625.600,- (99,72%)

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Purwakarta**

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi aspek tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun 2018-2023. Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Sistem Merit
2. Jumlah Sistem Pelayanan di Bidang Kepegawaian Yang Diaplikasikan dengan baik
3. Persentase Pemberian Penghargaan ASN Berprestasi/Berinovasi/Teladan/ Dedikasi dan ASN Purna Bhakti/ Pensiun
4. Jumlah Sistem Manajemen Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi Yang Sudah di Aplikasikan dengan baik.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Purwakarta**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BKPSDM					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Persentase Calon ASN yang telah mengikuti Pelatihan Dasar			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,02	0,00	100,00	97,46	100,00	
2	Persentase ASN yang diklat fungsional/ teknis//bimtek/seminar / lokakarya dan Tugas Belajar			0,28	1,53	1,53	1,53	1,53	4,29	1,88	0,20	0,99	1,53	
3	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural			4,01	12,15	12,5	12,5	12,5	4,01	4,25	4,98	12,15	12,5	
4	Persentase Penurunan Indisipliner Pegawai			3,13	3,33	3,33	3,33	3,33	2,86	0,64	0,43	5,88	3,33	
5	Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang Kepegawaian Yang di sosialisasikan			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	
6	Persentase Sistem Aplikasi Kinerja			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai			3,18	0,35	0,35	0,35	0,35	0,00	2,58	5,58	0,27	0,35	
8	Persentase Pengisian pemangku jabatan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas			99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	66,59	99,64	95,96	97,07	100,00	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BKPSDM					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(14)	(15)
9	persentase penataan ASN sesuai dengan kompetensi			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		9,64	72,00	91,93	100,00	
10	Persentase pelayanan kenaikan pangkat pegawai yang tepat waktu			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	106,33	82,73	82,73	84,54	100,00	
11	Persentase Data ASN yang Mutakhir			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,77	94,07	92,97	98,48	100,00	
12	Persentase Integrasi aplikasi kepegawaian			0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
13	Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN			100,00	100,00	-	-	-	100,00	0,00	-	-	-	
14	Persentase ASN Berprestasi/Berinovasi/ Teladan dan Berdedikasi yang mendapat Penghargaan			3,19	1,28	1,28	1,28	1,28	1,26	1,36	1,50	4,85	1,28	
15	Persentase ASN Purna Bhakti/ Pensiun yang mendapat penghargaan dan Tepat Waktu			100,00	4,23	4,23	4,23	4,23	4,30	5,10	6,01	4,65	4,23	

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Purwakarta**

Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 adalah :

#### **A. Unsur Kepegawaian**

1. Masih rendahnya PNS, Fungsional, dan PPPK yang mengikuti kegiatan assessment;
2. Kurangnya alokasi formasi untuk pemenuhan kebutuhan pegawai;

#### **B. Unsur Pendidikan dan Pelatihan**

1. Masih rendahnya peningkatan SDM PNS dan PPPK melalui pendidikan dan pelatihan;

Hasil identifikasi permasalahan sebelumnya, inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dapat dirumuskan menjadi isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM serta berpengaruh dalam pengembangan kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Purwakarta di masa yang akan datang, diantaranya :

1. Masih belum validnya database kepegawaian sehingga belum bisa mendukung pelayanan kepegawaian yang efektif dan efisien;
2. Pemetaan pegawai belum sepenuhnya sesuai antara jenis jabatan dan kualifikasi Pendidikan yang diharapkan;
3. Masih banyaknya inovasi pelayanan publik yang belum berimplikasi pada perbaikan pelayanan secara menyeluruh;
4. Rendahnya Profesional, kompetensi dan tingkat pendidikan, kualitas, kinerja, dan integritas ASN;

5. Masih belum optimalnya pemanfaatan dan penerapan teknologi informatika dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan Pelayanan;
6. Masih terdapat penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi;
7. Adanya kesenjangan kompetensi antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dapat dilihat dalam Tabel 2.3 Berdasarkan table tersebut, tidak terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil kebutuhan BKPSDM Kabupaten Purwakarta kecuali mengenai pagu penggunaan anggaran namun program dan kegiatan sudah terakomodir dalam RKPD 2024.

**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Kabupaten Purwakarta**

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
<b>A.</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>				<b>38.408.428.518</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>				<b>39.461.428.518</b>	
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Capaian SAKIP Perangkat Daerah; (Predikat)</b>  <b>Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran</b>	<b>A opini</b>  <b>90 persen</b>	<b>32.358.428.518</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Capaian SAKIP Perangkat Daerah; (Predikat)</b>  <b>Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran</b>	<b>A opini</b>  <b>90 persen</b>	<b>33.411.428.518</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>151.000.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>350.000.000</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	50.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	30.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	16.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	15.000.000	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	275.000.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)</b>	<b>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	<b>19 Dokumen</b>	<b>28.059.428.518</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)</b>	<b>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	<b>19 Dokumen</b>	<b>28.049.428.518</b>	
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang	28.004.428.518	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang	28.004.428.518	
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	15.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	15.000.000	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	15.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>15.000.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>15.000.000</b>	
10	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	15.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	15.000.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>185.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>288.000.000</b>	
11	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	56 Paket	58.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	56 Paket	58.000.000	
12	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	15.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	15.000.000	
13	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	12.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	115.000.000	
14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	50.000.000	
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	50.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	50.000.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>24 Laporan</b>	<b>1.190.000.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>24 Laporan</b>	<b>1.190.000.000</b>	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	70.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	70.000.000	
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	200.000.000	
18	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	100.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	100.000.000	
21	Penyediaan Bahan/Material	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	170.000.000	Penyediaan Bahan/Material	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	170.000.000	
22	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	75.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	75.000.000	
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	175.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	175.000.000	
24	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	50.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
25	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	150.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	150.000.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)</b>	<b>Jumlah Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>27 Unit</b>	<b>725.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)</b>	<b>Jumlah Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>27 Unit</b>	<b>725.000.000</b>	
26	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	400.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000	
27	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	75.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	700.000.000	
28	Pengadaan Mebel	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	22 Unit	200.000.000	Pengadaan Mebel	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	22 Unit	200.000.000	
29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	50.000.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)</b>	<b>Jumlah Hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>18 Laporan</b>	<b>1.573.000.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)</b>	<b>Jumlah Hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>18 Laporan</b>	<b>1.609.000.000</b>	
30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	470.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	470.000.000	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1.100.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1.136.000.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)</b>	<b>Jumlah Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>157 Unit</b>	<b>460.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)</b>	<b>Jumlah Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>157 Unit</b>	<b>460.000.000</b>	
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	135.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	135.000.000	
34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	75.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	75.000.000	
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000	
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	50.000.000	
II	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>		<b>Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</b>	<b>80,88%</b>	<b>6.050.000.000</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>		<b>Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</b>	<b>80,88%</b>	<b>6.050.000.000</b>	
			<b>Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai</b>	<b>100%</b>				<b>Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai</b>	<b>100%</b>		
			<b>Persentase Pemberhentian ASN</b>	<b>5,73%</b>				<b>Persentase Pemberhentian ASN</b>	<b>5,73%</b>		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa	2,15%				Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa	2,15%		
			Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	16,99%				Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	16,99%		
			Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	49,80%				Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	49,80%		
			Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	34 orang				Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	34 orang		
			Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	172 orang				Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	172 orang		
			Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	504 orang				Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	504 orang		
			Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai	0,29%				Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai	0,29%		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Pemeberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	409 Dokumen	1.600.000.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Pemeberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	409 Dokumen	1.600.000.000	
37	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	4 Dokumen	100.000.000	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	4 Dokumen	100.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
38	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	100.000.000	
39	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	400.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	400.000.000	
40	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	150.000.000	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	150.000.000	
41	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	400 Dokumen	100.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	400 Dokumen	100.000.000	
42	Evaluasi Pemberhentian ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen	300.000.000	Evaluasi Pemberhentian ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen	300.000.000	
43	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1 Lembaga	50.000.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1 Lembaga	50.000.000	
44	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	200.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	200.000.000	
45	Pengelolaan Data Kepegawaian	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	100.000.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	100.000.000	
46	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	100.000.000	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	100.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>2.175.000.000</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>2.175.000.000</b>	
47	Pengelolaan Mutasi ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	100.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	100.000.000	
48	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	5 Dokumen	375.000.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	5 Dokumen	375.000.000	
49	Pengelolaan Promosi ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1.700.000.000	Pengelolaan Promosi ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1.700.000.000	
	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)</b>	<b>Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi ASN</b>	<b>245 Orang</b>	<b>1.275.000.000</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)</b>	<b>Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi ASN</b>	<b>245 Orang</b>	<b>1.275.000.000</b>	
50	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	150 Orang	450.000.000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	150 Orang	450.000.000	
51	Pengelolaan Assessment Center	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	225.000.000	Pengelolaan Assessment Center	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	225.000.000	
52	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10 Orang	300.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10 Orang	300.000.000	
53	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	75.000.000	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	75.000.000	
54	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	60 Orang	75.000.000	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	60 Orang	75.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
55	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	25 Orang	75.000.000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	25 Orang	75.000.000,	
56	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan	75.000.000	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan	75.000.000	
	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)</b>	<b>Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)</b>	<b>Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>1.000.000.000</b>	
57	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	200.000.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	200.000.000	
58	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	150.000.000	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	150.000.000	
59	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	10 Orang	200.000.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	10 Orang	200.000.000	
60	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	150 Orang	50.000.000	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	150 Orang	50.000.000	
61	Pembinaan Disiplin ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 Orang	250.000.000	Pembinaan Disiplin ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 Orang	250.000.000	
62	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	75.000.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	75.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
63	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15 Dokumen	75.000.000	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15 Dokumen	75.000.000	
<b>B</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				<b>1.425.000.000</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				<b>1.425.000.000</b>	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	25 Jam	1.425.000.000	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	25 Jam	1.425.000.000	
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			1,00%	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal				1,00%			
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural			51,01%	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural				51,01%			
Persentase ASN Yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis			2,86%	Persentase ASN Yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis				2,86%			
	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)</b>	<b>Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>50 Orang</b>	<b>525.000.000</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)</b>	<b>Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>50 Orang</b>	<b>525.000.000</b>	
64	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	50 Orang	<b>525.000.000</b>	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	50 Orang	525.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Laporan Hasil Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3 Laporan	900.000.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Laporan Hasil Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3 Laporan	900.000.000	
65	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	900.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	900.000.000	
<b>Total</b>					<b>39.833.428.518</b>	<b>Total</b>					<b>40.886.428.518</b>

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Mengingat bahwa BKPSDM Kabupaten Purwakarta merupakan perangkat daerah yang mengurus Pelayanan Kepegawaian/ASN menjalankan fungsi urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM, maka tidak mengampu kegiatan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2024 Kabupaten Purwakarta**

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	Tidak ada program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan masyarakat dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM khususnya pada tugas di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**BKPSDM KABUPATEN PURWAKARTA**

**3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dokumen perencanaan pembangunan nasional dalam bidang aparatur disusun dalam rangka membangun birokrasi yang berdaya saing global. Daya saing tersebut berfokus pada peningkatan kualitas ASN khususnya pada peningkatan kompetensi ASN dan manajemen ASN berbasis sistem merit. ASN sebagai motor penyelenggara roda pemerintahan, pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan dibutuhkan kompetensi yang sesuai. Salah satu upaya peningkatan kompetensi dimaksud adalah dengan pengembangan sumber daya ASN melalui Pendidikan dan pelatihan

Selain itu, pengembangan kompetensi ASN juga merupakan bagian penting dalam reformasi birokrasi yang berperan pada pembangunan bangsa secara berkesinambungan. Upaya pengembangan kompetensi ASN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mewajibkan seluruh ASN mengikuti pengembangan kompetensi minimum 20 jam pelajaran per tahun. Hal ini berarti setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi ASN yang bersangkutan.

Dalam 7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional, agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas, yang menjadi acuan BKPSDM Kabupaten Purwakarta yaitu **"Penguatan implementasi manajemen ASN "**

Sedangkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Purwakarta untuk tahun 2024 tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun

2024-2026. Adapun tema Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sebagai berikut :

**“MENINGKATKAN PEMULIHAN EKONOMI DAN DAYA SAING  
DAERAH”**

Arah Kebijakan yang menjadi acuan BKPSDM Kabupaten Purwakarta yaitu :

1. Mengembangkan potensi dan kompetensi bagi seluruh pegawai
2. Meningkatkan pengelolaan administrasi dan kepegawaian secara professional

Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah menyusun RKPD Tahun 2024 sesuai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai dalam Permendagri 90 Tahun 2019. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas dua urusan, yaitu urusan kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan. Hal tersebut sesuai dengan tugas fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta yang tertuang dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023 bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan sebagai bagian dari peningkatan kualitas dan pengembangan kompetensi ASN pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM Kabupaten Purwakarta**

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan uraian isu strategis dan permasalahan pembangunan serta penjabaran visi dan misi pembangunan yang termuat dalam

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, yang menjadi acuan BKPSDM Kabupaten Purwakarta adalah Misi 1 **“Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah”** dengan tujuan **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berdaya Saing”**. Dan Misi 5 **“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat”** dengan tujuan **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel “**

Sedangkan sasaran pada misi 1 (satu) RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 yang sesuai dengan bidang Aparatur dan Kepegawaian adalah **“Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat”** dan Sasaran misi 5 **“Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE”** dan **“Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**

Terkait dengan penjabaran tujuan dan sasaran daerah maka rumusan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program**  
**Pada BKPSDM Kabupaten Purwakarta**

Visi : PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH

Misi : (1) Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah

(5) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2024	Program	Indikator Program	Satuan Target	Target 2024
1. Meningkatkan Kualitas SDM aparatur	1. Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai	1. Tingkat Profesionalitas ASN	Sangat Rendah	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	persen	25
					2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen	1,00
					3. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen	51,01
					4. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	persen	2,86

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2024	Program	Indikator Program	Satuan Target	Target 2024
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	2. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik				
3. Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	3. Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	4. Indeks Sistem Merit Kabupaten	Baik	Program Kepegawaian Daerah	6. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	80,88
					7. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	16,99
					8. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	49,80
					9. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	orang	34
					10. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	orang	172

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2024	Program	Indikator Program	Satuan Target	Target 2024
					11. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang	504
					12. Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai	persen	0,29
					13. Persentase Pemberhentian ASN	persen	5,73
					14. Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa	persen	2,15
					15. Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai	persen	100

Sumber : Renstra BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta berdasarkan urusan yang ditangani yaitu Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pada Tahun 2014 BKPSDM Kabupaten Purwakarta terbagi dalam 3 Program, 14 Kegiatan dan 65 Sub Kegiatan. Program dan Kegiatan inilah yang mendukung pencapaian kinerja BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. Program dan Kegiatan tersebut yaitu :



**Tabel 3.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**  
**Kabupaten Purwakarta**

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				39.833.428.518				40.400.654.010
5	03				KEPEGAWAIAN				38.408.428.518				38.930.654.010
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah;	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Cisureuh	A Opini;	32.358.428.518	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		A Opini;	32.855.654.010
				Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran		90 Persen		90 Persen					
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Cisureuh	5 dokumen	151.000.000			5 dokumen	151.000.000
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	3 dokumen	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 dokumen	50.000.000
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	1 Dokumen	16.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	16.000.000
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	1 Dokumen	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	15.000.000
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	1 Laporan	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	20.000.000
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	1 Laporan	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	50.000.000

Kode					Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	19 Dokumen	28.059.428.518			19 Dokumen	28.556.654.010
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	63 Orang	28.004.428.518	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		63 Orang	28.501.654.010
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	2 Dokumen	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	15.000.000
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	1 Laporan	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	15.000.000
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	18 Laporan	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Laporan	25.000.000
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	1 Dokumen	15.000.000			1 Dokumen	15.000.000
5	03	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	1 dokumen	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	15.000.000
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	2 Dokumen	185.000.000			2 Dokumen	235.000.000
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	56 Paket	58.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		58 Paket	107.500.000
5	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	1 Dokumen	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	15.000.000
5	03	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	1 Dokumen	12.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	12.500.000

Kode					Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	25 Orang	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Orang	50.000.000
5	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	40 Orang	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Orang	50.000.000
5	03	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)</b>	<b>24 Laporan</b>	<b>1.190.000.000</b>			<b>24 Laporan</b>	<b>1.215.000.000</b>
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	2 Paket	70.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	70.000.000
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	6 Paket	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Paket	200.000.000
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	1 Paket	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	75.000.000
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	1 Paket	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	150.000.000
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	2 Paket	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	100.000.000
5	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	2 Paket	170.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	170.000.000
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	12 Laporan	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	75.000.000
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	12 Laporan	175.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	175.000.000
5	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	2 Dokumen	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	50.000.000

Kode					Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	3 Dokumen	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	150.000.000
5	03	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)</b>	<b>27 Unit</b>	<b>725.000.000</b>			<b>17 Unit</b>	<b>650.000.000</b>
5	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	1 Unit	400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	400.000.000
5	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	1 unit	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 unit	-
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	22 Unit	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Unit	200.000.000
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	3 Unit	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	50.000.000
5	03	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)</b>	<b>18 Laporan</b>	<b>1.573.000.000</b>			<b>18 Laporan</b>	<b>1.573.000.000</b>
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	1 Laporan	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	3.000.000
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	4 Laporan	470.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	470.000.000
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	13 Laporan	1.100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Laporan	1.100.000.000
5	03	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)</b>	<b>157 Unit</b>	<b>460.000.000</b>			<b>161 Unit</b>	<b>460.000.000</b>
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	25 Unit	135.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Unit	135.000.000

Kode					Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	90 Unit	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		92 Unit	75.000.000
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	2 Unit	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	200.000.000
5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	40 Unit	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		42 Unit	50.000.000
5	03	02			<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</b> <b>Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai</b> <b>Persentase Pemberhentian ASN</b> <b>Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa</b> <b>Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</b> <b>Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</b> <b>Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah</b> <b>Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah</b> <b>Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah</b>		<b>80,88%</b> <b>100%</b> <b>5,73%</b> <b>2,15%</b> <b>16,99%</b> <b>49,80%</b> <b>34%</b> <b>172%</b> <b>504%</b>	<b>6.050.000.000</b>				<b>6.075.000.000</b>

Kode					Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai		0,29%					
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Pemeberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	409 Dokumen	1.600.000.000			424 Dokumen	1.600.000.000
5	03	02	2.01	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	4 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	100.000.000
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	1 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	100.000.000
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	1 Dokumen	400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	400.000.000
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	1 Laporan	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	150.000.000
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	400 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		415 Dokumen	100.000.000
5	03	02	2.01	07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	1 Dokumen	300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	300.000.000
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	1 Lembaga	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Lembaga	50.000.000
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	1 Dokumen	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	200.000.000
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	1 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	100.000.000
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	1 Laporan	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	100.000.000

Kode					Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03	02	2.02		<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>2.175.000.000</b>			<b>8 Dokumen</b>	<b>2.200.000.000</b>
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	2 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	100.000.000
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	5 Dokumen	375.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	400.000.000
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	1 Dokumen	1.700.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	1.700.000.000
5	03	02	2.03		<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi ASN</b>	<b>(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)</b>	<b>245 Orang</b>	<b>1.275.000.000</b>			<b>255 Orang</b>	<b>1.275.000.000</b>
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	150 Orang	450.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150 Orang	450.000.000
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	1 Dokumen	225.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	225.000.000
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	10 Orang	300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Orang	300.000.000
5	03	02	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	1 Dokumen	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	75.000.000
5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	60 Orang	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60 Orang	75.000.000
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	25 Orang	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Orang	75.000.000

Kode					Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03	02	2.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	1 Laporan	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	75.000.000
5	03	02	2.04		<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>1.000.000.000</b>			<b>2 Laporan</b>	<b>1.000.000.000</b>
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	1 Dokumen	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	200.000.000
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	1 Laporan	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	150.000.000
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	10 Orang	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Orang	200.000.000
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	150 Orang	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		142 Orang	50.000.000
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	100 Orang	250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	250.000.000
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	1 Laporan	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	75.000.000
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	15 Dokumen	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Dokumen	75.000.000
5	04				<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				<b>1.425.000.000</b>				<b>1.470.000.000</b>
5	04	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		25 Jam	1.425.000.000				1.470.000.000
						Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		1,00%					

Kode					Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural		51,01%					
						Persentase ASN Yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis		2,86%					
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	50 Orang	525.000.000			50 Orang	570.000.000
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	50 Orang	525.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55 Orang	570.000.000
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	3 Laporan	900.000.000			2 Laporan	900.000.000
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	3 Laporan	900.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	900.000.000
<b>TOTAL</b>									<b>39.833.428.518</b>				<b>40.400.654.010</b>

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**BKPSDM KABUPATEN PURWAKARTA**

**4.1 Rencana Kerja**

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, maka seluruh program dan kegiatan pada tahun 2024 diarahkan untuk mewujudkan pencapaian hal tersebut.

Penyajian Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM Kabupaten Purwakarta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Serta Program, Kegiatan dan Subkegiatan telah dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. maka penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sudah sesuai dan selaras dengan program prioritas pembangunan dan arah kebijakan daerah dengan kebijakan Pusat dalam rangka mendukung program-program prioritas nasional di daerah.

Program Pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-206 terdiri dari :

**A. PROGRAM PADA SEMUA PERANGKAT DAERAH**

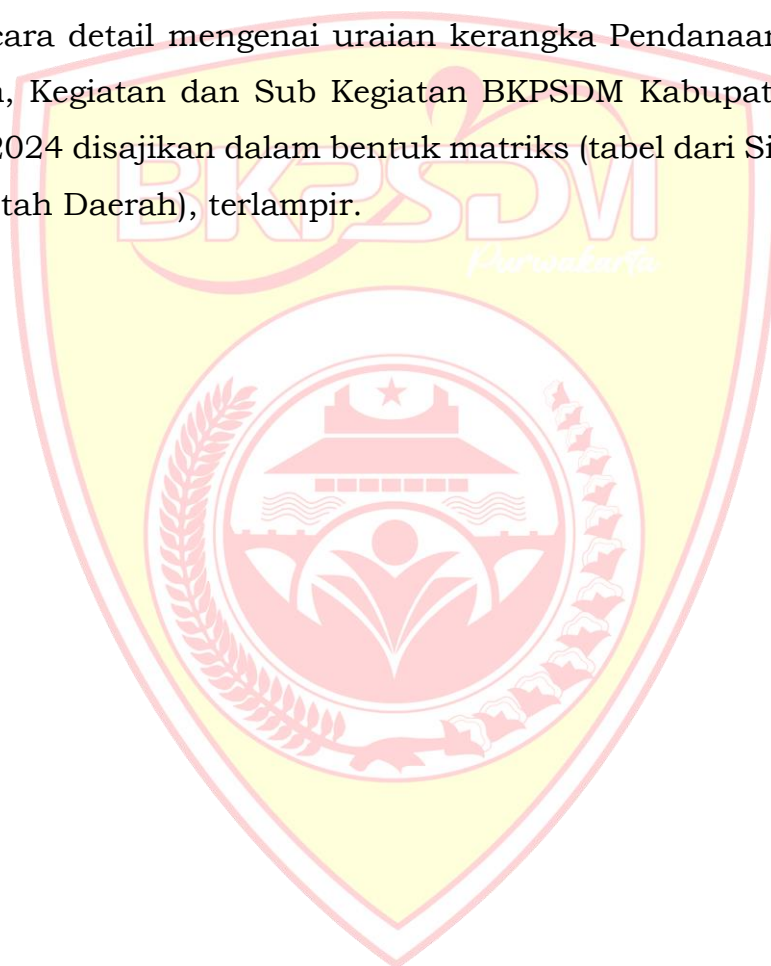
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

## **B. PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH**

1. Program Teknis Urusan Kepegawaian
  - 1) Program Teknis Urusan Kepegawaian
2. Program Teknis Urusan Pendidikan dan Pelatihan
  - 1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

### **4.2 Pendanaan**

Secara detail mengenai uraian kerangka Pendanaan dan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 disajikan dalam bentuk matriks (tabel dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah), terlampir.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan penjabaran dari visi dan misi Rencana Strategis 2024-2026 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Adapun nomenklatur program, kegiatan serta subkegiatan pada dokumen rencana kerja ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Memahami evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, BKPSDM Kabupaten Purwakarta berusaha menetapkan Rencana kerja Tahun 2024 agar program dan kegiatannya selalu dapat mendukung peningkatan pelayanan BKPSDM Kabupaten Purwakarta terhadap publik maupun PNS di lingkungan Kabupaten Purwakarta. Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta tahun 2024 ini sudah melalui tahapan-tahapan yang dipersyaratkan, dan pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal, sehingga keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 ini menjadi tanggung jawab bersama pegawai dan para pemangku kepentingan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta. Dengan demikian Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan pedoman dasar untuk penyusunan rancangan anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi acuan pengelolaan

kegiatan dan anggaran dalam rangka mencapai visi Kabupaten purwakarta yaitu **“PURWAKARTA CERDAS, SEHAT, DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”**

Rencana Kerja hendaknya tidak dipandang sebagai pemenuhan kewajiban normatif semata, tetapi hal yang terpenting dan menjadi inti permasalahan adalah perubahan paradigma berpikir dan bertindak sesuai dengan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024. Karena itu Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 akan dapat terlaksana apabila terdapat komitmen dari seluruh jajaran aparatur lingkungan BKPSDM Kabupaten Purwakarta mulai dari pimpinan sampai dengan pelaksana dalam melaksanakan kesepakatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

Dengan adanya Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini diharapkan agar pencapaian sasaran strategis OPD, target program dan kegiatan dapat lebih fokus, terintegrasi serta dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat menghasilkan dampak yang positif terhadap masyarakat umum serta bagi pengguna layanan BKPSDM Kabupaten Purwakarta Adapun dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tidak terlepas dari penerapan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Purwakarta, Juli 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN PURWAKARTA



**H. WAHYU WIBISONO**

NP. 196708291995031001

# LAMPIRAN

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						39.833.428.518,00							40.400.654.010,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						38.408.428.518,00							38.930.654.010,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)</i>				A	32.358.428.518,00							32.855.654.010,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)</i>					151.000.000,00							151.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>					50.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>		3.00	2.00	3.00	50.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BKPSDM	3.00	50.000.000,00	
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)</i>			2.00	1.00	16.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1.00	16.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)</i>			1.00	1.00	15.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1.00	15.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>			1.00	1.00	20.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1.00	20.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</i>		1.00	1.00	1.00	50.000.000,00 50.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1.00	50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun (Laporan / Dokumen)</i>				19.00	28.059.428.518,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)					19.00	28.556.654.010,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)</i>		52.00	65.00	63.00	28.004.428.518,00 28.004.428.518,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN BKPSDM Kab. Purwakarta	63.00	28.501.654.010,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)</i>		0.00	0.00	2.00	15.000.000,00 15.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Verifikasi keuangan BKPSDM	2.00	15.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)</i>		1.00	1.00	1.00	15.000.000,00 15.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1.00	15.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)</i>		13.00	1.00	18.00	25.000.000,00 25.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Laporan keuangan BKPSDM	18.00	25.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)</i>				1.00	15.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)					1.00	15.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						15.000.000,00							15.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)</i>		1.00	1.00	1.00	15.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN bagian BMD	1.00	15.000.000,00	
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						185.000.000,00							235.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			<i>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)</i>				2.00	185.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)					2.00		
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						58.000.000,00							107.500.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)</i>		0.00	0.00	56.00	58.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN BKPSDM	58.00	107.500.000,00	
	5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						15.000.000,00							15.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)</i>		0.00	0.00	1.00	15.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1.00	15.000.000,00	
	5.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						12.000.000,00							12.500.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)</i>		1.00	1.00	1.00	12.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1.00	12.500.000,00	
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00							50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)</i>		0.00	0.00	25.00	50.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	25.00	50.000.000,00	
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						50.000.000,00							50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)</i>		30.00	36.00	40.00	50.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	40.00	50.000.000,00	
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.190.000.000,00							1.215.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			<i>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Laporan)</i>				24.00		(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)					24.00		
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						70.000.000,00							70.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>		1.00	1.00	2.00	70.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bangunan kantor BKPSDM	2.00	70.000.000,00	
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						200.000.000,00							200.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>		1.00	1.00	6.00	200.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bangunan BKPSDM	6.00	200.000.000,00	
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						50.000.000,00							75.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)</i>		1.00	1.00	1.00	50.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Peralatan rumah tangga BKPSDM	1.00	75.000.000,00	
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						150.000.000,00							150.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)</i>		1.00	1.00	1.00	150.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bahan logistik BKPSDM	1.00	150.000.000,00	
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						100.000.000,00							100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i>		1.00	1.00	2.00	100.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang cetakan BKPSDM	2.00	100.000.000,00	
	5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						170.000.000,00							170.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)</i>		1.00	1.00	2.00	170.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	2.00	170.000.000,00	
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						75.000.000,00							75.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)</i>		8.00	5.00	12.00	75.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tamu	12.00	75.000.000,00	
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						175.000.000,00							175.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>		1.00	1.00	12.00	175.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	12.00	175.000.000,00	
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						50.000.000,00							50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		1.00	2.00	2.00	50.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen arsip	2.00	50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		3.00	3.00	3.00	150.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	3.00	150.000.000,00	
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						725.000.000,00							650.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Unit)				27.00		(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)					17.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		0.00	0.00	1.00	400.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan dinas	1.00	400.000.000,00	
	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						75.000.000,00							-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		0.00	0.00	1.00	75.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			kendaraan dinas BKPSDM	0.00		
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						200.000.000,00							200.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		1.00	8.00	22.00	200.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mebel BKPSDM	13.00	200.000.000,00	
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		0.00	0.00	3.00	50.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			peralatan dan mesin BKPSDM	3.00	50.000.000,00	
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.573.000.000,00							1.573.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)				18.00		(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)					18.00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>		1.00	2.00	1.00	3.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1.00	3.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>		4.00	12.00	4.00	470.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BKPSDM	4.00	470.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>		24.00	21.00	13.00	1.100.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PTT, THL, Non PNS	13.00	1.100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Unit)</i>				157.00	460.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)					161.00	460.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>		20.00	27.00	25.00	135.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan dinas	25.00	135.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)</i>		4.00	1.00	90.00	75.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			peralatan dan mesin	92.00	75.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)</i>		2.00	2.00	2.00	200.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gedung BKPSDM	2.00	200.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00							50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)</i>		1.00	5.00	40.00	50.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bangunan BKPSDM	42.00	50.000.000,00	
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	<i>Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (Persentase)</i> <i>Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai (Persentase)</i> <i>Persentase Pemberhentian ASN (Persentase)</i> <i>Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa (Persentase)</i> <i>Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (Persentase)</i> <i>Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (Persentase)</i> <i>Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah (Orang)</i> <i>Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah (Orang)</i> <i>Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (Orang)</i> <i>Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai (Persentase)</i>				80,88	6.050.000.000,00							6.075.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	<i>Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN (Dokumen)</i>				409.00	1.600.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)					424	1.600.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.01.0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN (Dokumen )</i>		1.00	1.00	4.00	100.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengadaan ASN	4.00	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen )	1.00	1.00	1.00	100.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN	1.00	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen )	1.00	1.00	1.00	400.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PNS dan PPPK	1.00	400.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN (Laporan)	1.00	1.00	1.00	150.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	1.00	150.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen )	490.00	423.00	400.00	100.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Optimalisasi Penerapan sistem Merit	415.00	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
5.03.02.2.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN (Dokumen)	1.00	1.00	1.00	300.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	1.00	300.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1.00	1.00	1.00	50.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Optimalisasi penerapan sistem Merit	1.00	50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen )	1.00	1.00	1.00	200.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Optimalisasi penerapan sistem Merit	1.00	200.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen )	1.00	1.00	1.00	100.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Optimalisasi Penerapan sistem merit	1.00	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Laporan)		1.00	1.00	1.00	100.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Optimalisasi penerapan sistem Merit	1.00	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Mutasi dan Promosi ASN (Dokumen)				8.00	2.175.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)					8.00	2.200.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen )		1.00	1.00	2.00	100.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Optimalisasi penerapan sistem merit	2.00	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen )		2.00	2.00	5.00	375.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			optimalisasi penerapan sistem merit	5.00	400.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen )		1.00	1.00	1.00	1.700.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Optimalisasi penerapan sistem merit	1.00	1.700.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi ASN (Orang)				245.00	1.275.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)					255.00	1.275.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)		83.00	80.00	150.00	450.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Optimalisasi Penerapan sistem Merit	150.00	450.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen )		1.00	1.00	1.00	225.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Optimalisasi Penerapan sistem merit	1.00	225.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						300.000.000,00								
			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)</i>		8.00	10.00	10.00	300.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	15.00	300.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN						75.000.000,00								
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN (Dokumen)</i>		1.00	1.00	1.00	75.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1.00	75.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN						75.000.000,00								
			<i>Jumlah ASN Fungsional yang Dibina (Orang)</i>		0.00	0.00	60.00	75.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	60.00	75.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional						75.000.000,00								
			<i>Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)</i>		11.00	50.00	25.00	75.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	30.00	75.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional						75.000.000,00								
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional (Laporan)</i>		0.00	0.00	1.00	75.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1.00	75.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						1.000.000.000,00								
			<i>Jumlah Laporan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur (Laporan)</i>				2.00		(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)					2.00	1.000.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						200.000.000,00								
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)</i>		1.00	1.00	1.00	200.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Optimalisasi penerapan sistem merit	1.00	200.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						150.000.000,00								
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Laporan)</i>		1.00	2.00	1.00	150.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	1.00	150.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)		20.00	0.00	10.00	200.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Optimalisasi penerapan sistem merit	10.00	200.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)		161.00	100.00	150.00	50.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Optimalisasi penerapan sistem merit	142.00	50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)		90.00	90.00	100.00	250.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Optimalisasi Penerapan sistem Merit1	100.00	250.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)		1.00	1.00	1.00	75.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1.00	75.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)		0.00	0.00	15.00	75.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	15.00	75.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	<b>5.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>						<b>1.425.000.000,00</b>							<b>1.470.000.000,00</b>	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Jam) Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Persentase) Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (Persentase) Persentase ASN Yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis (Persentase)				25,00 1,00 51,01 2,86	1.425.000.000,00							1.470.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	<i>Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi teknis (Orang)</i>				50.00	525.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)					50.00	570.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	<i>Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)</i>		25.00	48.00	50.00	525.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	55.00	570.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi manajerial dan fungsional (Laporan)</i>				3.00	900.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)					2.00	900.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)</i>		1.00	1.00	3.00	900.000.000,00	(BKPSDM, KAB. PURWAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	2.00	900.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			<b>JUMLAH</b>					<b>39.833.428.518,00</b>							<b>40.400.654.010,00</b>	